

PERAN DIPLOMASI POLITIK LUAR NEGERI DAN ANGKATAN PERANG DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS NASIONAL

Widya Noventari

Program Studi Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada
Jl. Olahraga Bulaksumur Yogyakarta
email: noventari32@gmail.com

Abstract: In this dynamic era, national defense concept towards national stability becomes very important study in the life of the nation. This study is then used to determine the purpose and strategy of a country, and the country's position in the arena of international politics. In this case, Indonesia has the principle of independent and active foreign policy, in which Indonesia will not be interrupted by other countries. In this principle, the power of diplomacy takes the role as the soft power. This soft power of course cannot be separated from the hard power, which are governmental power and military in strengthening national defense and maintaining national stability.

Abstrak: Di tengah dinamika perubahan yang semakin cepat, konsep mengenai ketahanan nasional menuju stabilitas nasional menjadi bidang kajian yang amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini kemudian digunakan untuk menentukan arah dan strategi dari suatu negara serta posisi negara tersebut dalam percaturan kehidupan politik internasional. Dalam percaturan politik internasional Indonesia telah menentukan posisinya sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, dimana dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia tidak akan terpengaruh oleh tangan-tangan negara lain. Salah satu hal yang diutamakan dalam Politik bebas-aktif yang dianut oleh Indonesia adalah kekuatan diplomasi yang berperan sebagai *Soft Power* yang tentunya tidak akan bisa terlepas dari kekuatan kekuasaan, pemerintahan, dan angkatan perang (militer) sebagai *Hard Power* dalam memperkuat ketahanan Nasional dan menjaga stabilitas nasional.

Kata kunci: diplomasi, angkatan perang, stabilitas nasional

Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional Indonesia, pertumbuhan nasional, pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, keamanan nasional, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Politik Luar Negeri Indonesia secara diplomatis masih tetap mengacu pada politik luar negeri bebas-aktif yang semata didasarkan pada kepentingan nasional.

Kepentingan nasional ini merupakan landasan dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa-bernegara dalam mencapai cita-cita nasional. Dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia para pendiri bangsa yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan pemikirannya untuk merancang sebuah konsep atas posisi Indonesia ditangan pusaran arus politik

luar negeri yang begitu kuat. Seperti diantaranya yaitu hasil buah pemikiran Moh. Hatta yang menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas-aktif yang berarti Indonesia tidak terikat dengan salah satu blok baik komunis maupun kapitalis. Namun pada saat yang sama tetap berperan aktif dalam pergaulan internasional dengan tetap memegang teguh tujuan nasional.

Dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 2 September 1948 di depan sidang BP KNIP, Bung Hatta mengatakan bahwa "Pendirian yang harus diambil ialah jangan sampai kita menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka Seluruhnya". Hal ini menjadi pendirian bagi Indonesia bahwa dalam posisi ini harus mampu berjuang dan percaya diri terhadap

kemampuan diri sendiri, tetapi hal ini tidak lantas membuat Indonesia tidak mau mengambil keuntungan atas perkembangan situasi internasional untuk kepentingan bangsa. Kemudian pidato Bung Hatta ini diterbitkan menjadi buku dengan judul “Mendayung Diantara Dua Karang” yang merujuk posisi Indonesia di antara dua negara adi daya yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Ditengah arus perubahan yang cepat ini maka menghadirkan sebuah fenomena global dimana dunia tanpa tapal batas, dan mempengaruhi tata kehidupan masyarakat global. Dalam kehidupan politik, peran negara semakin mengurang seiring munculnya aktor-aktor NGO yang mendominasi. Pasca-perang dingin antara kedua kekuatan (bi-polar) pun ternyata juga belum menjamin perkembangan keamanan dan perdamaian dunia, justru perkembangannya mengarah pada anacaman keamanan yang bersifat asimetris yang dihasilkan dari persaingan yang lebih bersifat multipolar. Terjadinya konflik horizontal di beberapa negara, terorisme, narkoba, psikotropika, human trafficking masih menjadi ancaman. Issue tentang pemusnah misalnya, senjata nuklir, sengketa antar negara, serangan senjata di palestina menjadi contoh. Dewasa ini penguasaan ruang hidup tidak lagi penguasaan secara militer (power) tetapi lebih secara politik dan ekonomi dalam bentuk pengaruh, perkembangan situasi yang berlangsung sangat cepat dan penuh ketidak pastian (Soebagyo, 2013: 1).

Akan tetapi untuk menyeimbangkan antara peran diplomasi yang baik bagi suatu negara kekuatan angkatan perang memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi suatu wilayah teritorial dalam rangka menjamin keamanan nasional dan kepentingan nasional warga negaranya. Peranan angkatan perang disini sangat penting mengingat dalam sejarah Indonesia pernah mengirim pasukan perang yang diberi nama “Pasukan Garuda” dan beberapa pasukan perang yang lain untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal ini merupakan sebuah upaya hubungan diplomatik antara negara-bangsa yang ada di dunia untuk saling menjaga perdamaian dan keadilan dunia.

Garis besar pemaparan essay ini terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia yang menjadi kunci penting serta peran angkatan perang dengan kekuatan militernya dan kekuasaan (power) yang akan dikaitkan dengan konteks kekinian terkait dengan konsep keamanan nasional.

Dimana hal ini juga menjadi issue yang sangat menarik untuk dikaji, bahkan tema ini juga menjadi salah satu topik dari debat capres putaran ke tiga pemilu 2014 ini dengan tema “Politik Internasional dan Keamanan”

TEORI POLITIK INTERNASIONAL

Teori Politik Internasional menurut penganut teori realisme yang dipaparkan oleh Hans J. Morgenthau (2010: 3-4) bahwa paham ini memperhatikan secara teoritis terhadap hakikat manusia sebagaimana terwujudnya, dan secara sejarah seperti apa sesungguhnya manusia yang membuat teori ini dikatakan sebagai realisme. Sejarah politik modern merupakan kisah perlombaan dan pertentangan antara kedua mazhab yang pada dasarnya memiliki perbedaan dalam memahami hakikat manusia, masyarakat, dan politik. Salah satu mazhab percaya bahwa tatanan politik rasional dan moral dalam prinsip-prinsip yang abstrak mampu tercapai sekarang juga. Mazhab ini menganggap penting bahwa kebaikan dan kemampuan manusia tidak hanya sebatas penyesuaian diri, dan menganggap kegagalan dalam tatanan sosial untuk memenuhi norma rasional karena tidak adanya pemahaman dan pengertian yang jelas, lembaga sosial yang kuno, dan rendahnya moral para oknum atau kelompok yang tersingkirkan. Mazhab ini percaya melalui pendidikan, pembaharuan, dan pemakaian kekuatan yang sporadis untuk memperbaiki kelemahan lembaga-lembaga tersebut.

Mazhab yang lain percaya, bahwa dunia dalam keadaan yang tidak sempurna secara rasional, merupakan sebuah hasil yang sudah secara inheren dari hakikat manusia. Untuk memperbaiki dunia harus dengan kerja keras dengan kekuatan itu tidak dengan melawanya. Mazhab ini menegaskan secara rasional bahwa konsep moral tidak akan bisa di wujudkan secara sepenuhnya tetapi dalam hal yang paling baik harus didekati melalui pertimbangan kepentingan. Mazhab ini tertarik pada fenomena sejarah dan tidak pada prinsip yang abstrak, dan lebih bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan hingga pada level yang paling kecil ketimbang mewujudkan kebaikan yang absolute (mutlak).

Realisme menganggap bahwa sifat politik luar negeri hanya dapat dipastikan melalui pemeriksaan tindakan-tindakan politik yang dilakukan dan akibat yang dapat diduga dari

tindakan-tindakan itu. Dengan demikian, kita dapat mengetahui, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh para negarawan, dan dari akibat tindakan-tindakan mereka yang dapat diduga, dapat juga mengira apa yang mungkin menjadi tujuan mereka (Morgenthau, 2010: 5). Oleh karena itu, dalam pemaparan essay ini akan menggunakan prinsip realisme untuk mengkaji konteks diplomasi politik luar negeri dan angkatan perang Indonesia terhadap konsepsi pertahanan nasional.

DIPLOMASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Berangkat dari uraian diatas tidak berlebihan bila dikatakan bahwa arus perubahan dalam politik global telah menjadikan isu internasional menjadi lebih kompleks. Pemahaman tentang konstelasi politik dan kecakapan untuk merespon secara tepat isu-isu tersebut baik sekarang dan dimasa yang akan datang menjadi sangat diperlukan. Dalam beberapa studi kasus isu-isu politik internasional sekarang mengalami pergeseran tidak lagi hanya terkait dengan perang dan kekerasan tetapi sudah merembet pada ranah yang lebih kompleks yakni isu ekonomi, kebudayaan, dan bahkan kebudayaan. Oleh karena itu peran diplomasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara negara menjadi sangat penting.

Beberapa menteri luar negeri Indonesia yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik seperti Achmad Soebarjdo, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim, Mr. Roem, dan Moh. Hatta serta beberapa menteri luar negeri selanjutnya selalu mengedepankan diplomasi dalam hubungan Luar negeri Indonesia. Wuryandari (2008:5) memaparkan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia, arah kebijakan politik dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menentang segala bentuk penjajahan diatas dunia. Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pemerintah Indonesia dengan cerdas menggunakan strategi penggalangan kekuatan internasional. Para diplomat Indonesia menyadari bahwa cita-cita bangsa tidak mungkin tercapai tanpa dukungan internasional. Meskipun dilihat dari beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang relatif lemah sejak awal masa kemerdekaan hingga sekarang, namun kebijakan politik luar negerinya terus berusaha memainkan peranan

yang relatif independen sesuai dengan prinsip idealnya yang bebas aktif.

Sebagai contoh yaitu dalam usaha mencapai perdamaian dunia ketika terjadi ketegangan antara dua raksasa dunia (Soviet Rusia dan Amerika Serikat) Sukarno melancarkan politik bebas aktifnya dengan tidak memihak salah satu blok negara. Sukarno berpendapat bahwa untuk tercapainya perdamaian dunia bukan dengan jalan mengurangi ketegangan antara dua negara raksasa tersebut, mengusahakan pelucutan senjata, dan bukan pula dengan menghentikan percobaan senjata nuklir. Sukarno disini memfokuskan segenap perhatiannya pada issue “imperialisme dan kolonialisme sebagai ancaman perdamaian dunia”. Diarena ini Sukarno mencoba menutup-nutupi keadaan sosial dan ekonomi Indonesia yang amat buruk di bawah pemerintahanya. Sebagai apologi terhadap kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang amat merosot, Sukarno kemudian menyatakan bahwa berdiri diatas kaki sendiri dan menolak bantuan asing untuk pembangunan nasional (Muhaimin, 2005:171-172). Hal ini merupakan sebuah kebijakan politik yang ambil oleh pemerintahan Sukarno ditengah negara-negara yang baru merdeka atau sedang berkembang menerima bantuan dari negara lain yang lebih maju.

Terkait dengan politik bebas-aktif yang dijadikan prinsip dalam diplomasi politik luar negeri Indonesia. Dalam pidatonya di depan Badan Pekerja KNIP pada 2 September 1948 dengan judul “Mendayung antara Dua Karang” yang merupakan penjelasan pertama kali tentang politik bebas aktif (Alami, 2008: 42-43), yaitu :

“Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan harus memilih saja antara pro-Rusia dan pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah bahwa Indonesia yang harus menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri...Politik Republik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan

kenyataan yang kita hadapi...Garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan negara itu sendiri”

Di dalam pemaparan diatas sebenarnya telah terlihat bagaimana prinsip dari politik bebas aktif Indonesia meskipun Moh. Hatta secara spesifik menggunakan istilah bebas aktif. Prinsip bebas Aktif ini tidak pernah berubah sejak kemerdekaan sampai sekarang. Dalam konteks pasca-perang dingin prinsip ini masih dianggap relevan bagi pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia tanpa campur tangan negara lain. Meskipun dengan berjalanya waktu menuju erah reformasi tangan-tangan luar yang ingin masuk dalam ranah rumah tangga pemerintahan Indonesia masih tetap ada.

Kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif seperti yang diutarakan oleh Moh. Hatta pada tahun 1952 menghadapi ujian, ketika diketahui bahwa Menlu Achmad Subardjo mengadakan perjanjian bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang diwakili oleh Duta besar Amerika, Merle Cohran. Akibatnya, Indonesia harus menaati ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Keamanan Bersama (*Mutual Security Act*), yang berarti pula penyimpangan terhadap prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Suatu protes keras terjadi dan mengakibatkan jatunya Kabinet Sukiman (Kasenda, 2014: 178). Apabila memang Indonesia menganut prinsip politik bebas aktif yang dicetuskan oleh Moh. Hatta, berarti bahwa politik luar negeri Indonesia harus menghindarkan diri dari keterikatan atas perjanjian internasional dengan salah satu blok. Keterikatan terhadap negara-negara besar, dianggap mengganggu keseimbangan kehidupan politik dan akan pula menghambat pembangunan Indonesia sebagai suatu bangsa yang bebas.

Pada era pemerintahan Presiden SBY istilah dalam politik luar negeri Indonesia tidak lagi “mendayung diantara dua karang”, karena kekuatan Uni Soviet telah lama runtuh. Konsep baru yang dilontarkan oleh Presiden SBY adalah *navigating a turbulent ocean* atau “mengarungi samudera yang bergolak”. Ini berarti telah terjadi perubahan yang sangat drastis seperti mulai masuknya era globalisasi, industrialisasi, masuknya pasar bebas, aktor-aktor NGO, dan lain sebagainya.

Salah satu contoh kebijakan yang dilakukan pemerintah SBY yakni kasus penyadapan intelijen Australia, *Defence Signals Directorate* (DSD) yang kini bernama Australian. Akibat pembocoran informasi dari whistleblower asal AS, Edward Snowden, kepada *Australian Broadcasting Corporation* (ABC) dan harian Inggris, *The Guardian*, gerakan anti-Australia semakin meluas di negeri ini. Itu diawali dengan reaksi keras Presiden SBY sebagai akibat kemarahannya merespons informasi dari kedua media massa tersebut yang menyatakan bahwa nama Presiden SBY, istri Presiden, dan sembilan orang dalam lingkaran kekuasaannya menjadi target penyadapan Australia.

Reaksi keras tersebut tentu juga dipicu respons dari PM Australia Tony Abbott yang dinilai tidak bersedia meminta maaf atas tindakan intelijen Negeri Kanguru tersebut yang terbongkar pasca pembocoran informasi oleh Edward Snowden. Hingga saat ini Indonesia memang sedang berjuang bersama Brasil dan Jerman untuk mengajukan petisi kepada PBB agar bersedia mengeluarkan aturan baku dan mengikat pada level internasional yang dapat memberikan sanksi tegas terhadap aksi penyadapan intelijen antarnegara.

Namun ketika era SBY inilah Indonesia memang mulai banyak menggunakan jalan diplomasi yang spektakuler yang diraih, dan tidak jarang mendapatkan pujian dari massa internasional bahwa Indonesia sudah masuk tahap transisi menuju demokrasi, meskipun belum demokrasi secara penuh dalam arti demokrasi. Isu demokrasi dan HAM yang bersifat global bagi Indonesia tidak lagi menjadi ganjalan dalam ranah diplomasi Internasional (Mashad, 2011:204). Indonesia bahkan disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar ke tiga setelah AS dan India, begitu juga halnya dalam penegakan hukum juga banyak mendapatkan apresiasi seiring dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat aktif memberantas para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi yang jelas berdampak negatif pada masyarakat dan negara khususnya. Pencapaian positif lainnya seperti Pemilihan Umum yang berhasil, stabilitas dan keamanan nasional yang tinggi dan pencapaian positif lainnya telah menimbulkan pandangan positif tentang Indonesia di mata internasional.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh M. Riefqi Muna (2011:158-159) bahwa dalam

merespon perkembangan-perkembangan yang telah diuraikan diatas, kebijakan luar negeri Indonesia telah memperkenalkan pendekatan intermestik. Dalam konteks ini, diplomasi Indonesia memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan nasional di luar negeri serta mendorong agar badan-badan multilateral memperhatikan kepentingan negara berkembang. Oleh karena itu, diplomasi multilateral Indonesia dilaksanakan dengan pendekatan total diplomasi, yang diartikan sebagai diplomasi yang tidak memisahkan antara faktor luar negeri dan domestik. Dalam konteks total diplomasi maka tidak hanya Departemen luar negeri (Deplu) yang menjadi pelaku diplomasi namun segenap komponen bangsa semaksimal mungkin dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan luar negeri Indonesia.

Disinilah Peranan Diplomasi (*soft power*) menjadi sebuah penyeimbang dari kekuatan militer atau angkatan perang (*hard power*). Morgenthau (2010:169) memaparkan bahwa faktor yang memperkuat stabilitas sebuah negara. Dalam melaksanakan hubungan internasional diplomasi adalah otak dari kekuatan sebuah negara dan moral merupakan jiwanya. Diplomasi yang tangkas dapat meningkatkan kekuatan suatu negara, melebihi apa yang dapat diharapkan dengan meningkatkan semua faktor lain yang digabungkannya.

ANGKATAN PERANG DAN STABILITAS NASIONAL

Di Indonesia sendiri, tujuan negara seperti yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada Ketuhanan YME, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pernyataan ini merupakan dasar dari keikutsertaan Indonesia khususnya para militer dan angkatan bersenjata untuk ikut serta dalam melaksanakan amanah UUD 1945 yakni menjaga ketertiban dunia.

Menurut undang-undang No. 34 Tahun 2004 pasal 1 (ayat 20) menyatakan bahwa militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan dalam pasal 5 tentang tentara nasional Indonesia, Militer (TNI) memiliki peranan diantaranya yakni TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Tap MPR No. VII Tahun 2000 pasal 3 TNI terdiri atas Angkatan darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam undang-undang.

Di banyak negara angkatan bersenjata merupakan komponen penting dalam melindungi negara dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini, peranan utama angkatan bersenjata adalah sebagai instrumen dalam menjalankan pertahanan nasional. Peran tersebut dilaksanakan baik melalui operasi perang maupun non-perang yang ruang lingkupnya bersifat eksternal maupun internal di dalam suatu negara. Sehingga dalam dinamika ketahanan nasional untuk mewujudkan stabilitas nasional peran diplomasi sangat diutamakan sebelum pada akhirnya dalam keadaan yang terpaksa dan darurat operasi perang itu digunakan, karena menurut prinsipnya dalam ilmu angkatan perang *war is the last resort* (perang adalah pilihan paling terakhir).

Sedangkan dalam pemberian tugas pertahanan kepada TNI untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dan tugas keamanan kepada Polri untuk menghadapi ancaman dari dalam dipandang sangat perlu untuk terciptanya kondisi masyarakat yang damai dan makmur. Melihat kembali catatan sejarah dari pasukan perang Indonesia dalam keikutsertaannya dalam perdamaian dunia yaitu tentang kiprah Pasukan Garuda yang kembali menuai prestasi. 167 Prajurit TNI di Haiti yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXII-B/MINUSTAH (*Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti*) menerima penghargaan Medali PBB. Pasukan perdamaian dari Indonesia ini mampu diterima dengan baik di negara penugasan. Sejak Kontingen Garuda I bertugas di Mesir tahun 1957, maka sejak tahun itulah pasukan baret biru di bawah PBB ini mengharumkan nama bangsa hingga saat ini. Inilah salah satu peran penting angkatan perang dalam menjaga pertahanan nasional baik di dalam maupun luar negeri.

Peranan angkatan perang disini juga untuk menangkal ancaman-ancaman yang dirasa mengancam stabilitas nasional yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Untuk meneropong ancaman terhadap Indonesia dapat ditelaah dengan menganalisis dinamika lingkungan strategis. Analisis dinamika lingkungan strategis ini menurut Prihatono (2007:67) menunjukkan bahwa ancaman akan termanifestasi dalam tiga jenis konflik, diantaranya *inter-state*, *intra-state*, dan *transnational conflicts*. Konflik *pertama* adalah konflik-konflik antara negara yang terutama mengancam kedaulatan teritorial Indonesia. Pengertian konflik ini adalah invasi militer dari negara lain. Kemungkinan merebaknya konflik ini bisa diperkecil jika Indonesia mampu melaksanakan (1) menggelar kekuatan penangkal (*deterrence*) yang memadai; (2) mengoptimalkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan untuk menghilangkan intensi dan situasi yang akan memicu konflik semakin terbuka. Konflik *kedua* adalah konflik internal yang bisa berupa gerakan sparatis bersenjata atau konflik komunal yang disebabkan SARA serta melibatkan senjata. Konflik ini akan bermanifestasi menjadi konflik bersenjata jika terjadi kegagalan beruntun dari pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengelola konflik secara konstruktif. Konflik *ketiga*, adalah konflik-konflik transnasional seperti terorisme, penyelundupan senjata, dan bajak laut. Konflik ini memiliki karakter baru seperti optimalisasi jejaringan internasional, intensitas konflik yang cenderung kecil, dan daerah sebaran konflik yang luas.

Dalam rangka memperkuat pertahanan nasional dan mempertahankan stabilitas nasional inilah, maka salah satu yang menjadi poin penting adalah mewujudkan hubungan sinergis antara segala komponen bangsa yang berperan dalam mempertahankan NKRI. Indikator dari keberhasilan tersebut tercermin dalam daya tangkal negara terhadap setiap ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Dewasa ini kebutuhan akan pemenuhan senjata angkatan perang Indonesia menjadi suatu hal yang penting. Mengingat bahwa posisi negara Indonesia yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan internasional yang menyebabkan hubungan Indonesia dengan Negara lain semakin erat. Oleh karena itu Indonesia menjadi incaran banyak negara-negara maju untuk menguasai

aset-aset kekayaan alam yang begitu melimpah di Indonesia. Oleh karena itu kelengkapan persenjataan angkatan perang Indonesia menjadi suatu hal yang *urgent* mengingat secara geografis Indonesia sangat strategis.

Persenjataan angkatan perang ini di anggap perlu karena sumber-sumber ancaman utama terhadap kemandirian tidak lagi merupakan ancaman terhadap keamanan/integrasi wilayah (konsep keamanan teritorial), melainkan langsung mengancam keamanan manusia (konsep keamanan manusia). Jika dalam konsep keamanan teritorial, sarana dan wahana dalam menghadapinya adalah kekuatan militer dengan berperang di medan perang, dalam konsep keamanan manusia perang berlangsung dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial. Dalam konsep keamanan teritorial, perhatian utama adalah negara, bangsa, dan senjata. Dalam konsep keamanan manusia, perhatian utamanya manusia itu sendiri, kehidupannya, dan martabatnya sebagai manusia (Habib, 1996:231). Oleh karena itu upaya untuk mengatasi ancaman dalam konsep keamanan nasional yang jauh lebih luas yaitu keamanan nasional dapat diatasi melalui upaya pembangunan manusia itu sendiri. Sehingga kecakapan dan ketanggapan manusia dalam menghadapi dinamika ketahanan nasional yang bersifat dinamis ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu kekuatan angkatan perang dalam mempertahankan wilayah teritorialnya dan peranan diplomasi dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di mata Internasional adalah agenda yang strategis.

Mengingat tantangan yang dihadapi oleh Indonesia maka dirasa perlu untuk melakukan transformasi pertahanan khususnya menempatkan teknologi militer (angkatan perang) sebagai variabel utama yang memungkinkan Indonesia untuk melakukan revolusi teknologi militer. Dalam mengembangkan kapasitas adopsi teknologi militer ini maka akan meningkatkan komponen-komponen militer secara signifikan. Pengembangan kapasitas adopsi teknologi militer ini akan tergantung dari kemampuan Indonesia untuk memperkuat industri-industri pertahanan nasional.

SIMPULAN

Didalam percaturan politik Internasional Indonesia telah menentukan posisinya sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri

bebas aktif, dimana dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia tidak akan terpengaruh oleh tanggapan negara lain. Disini Diplomasi berperan sebagai *Soft Power* yang tentunya tidak akan bisa terlepas dari kekuatan kekuasaan, pemerintahan, dan angkatan militer sebagai *Hard Power*.

Kekuatan dari diplomasi inilah yang menjadikan sebuah negara menjadi lebih tangguh

dalam mempertahankan ketahanan nasionalnya. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri juga keseimbangan antara diplomasi sebagai otaknya dan peranan angkatan militer sebagai raganya yang menggerakkan untuk mempertahankan stabilitas nasional Indonesia. Demikianlah penutup dari es-say ini karena secara keseluruhan kesimpulan saya kembalikan kepada para pembaca.

DAFTAR RUJUKAN

- Alami, A, N. 2008. "Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia" dalam Ganewati Wuryandari Dkk "Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik" . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habib, H. 1996. "Lingkungan Internasional dan Ketahanan Nasional" dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi "Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsespsi Ketahanan Nasional". Yogyakarta: UGM press.
- Kasenda, P. 2014. *Bung Karno Panglima Revolusi*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Mashad, D. 2011. "Indonesia Menjawab Tantangan Global" dalam Genawati Wuryandari "Politik Luar Negeri Indonesia: Ditengah Arus perubahan politik Internasional". Yogyakarta: Pustaka Pelajar & P2P-LIPI.
- Morgenthau, H, J. 2010. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhaimin, Y. 2005. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: UGM Press.
- Muina, M, R. 2011. "Politik-Keamanan Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia" dalam Genawati Wuryandari "Politik Luar Negeri Indonesia: Ditengah Arus perubahan politik Internasional". Yogyakarta: Pustaka Pelajar & P2P-LIPI.
- Prihantono, H, Dkk. 2007. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik Dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute.
- Wuryandari, G. 2008. "Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia: Sebuah Catatan yang Terlewat" dalam Ganewati Wuryandari Dkk "Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik" . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang dan Internet
- Hatta. 1948. "Mendayung Diantara Dua Karang". (online). (<https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/05/mendajung-antara-dua-karang.pdf>). Diakses 22 Oktober 2014.
- Soebagyo, O. 2013. "Pengaruh dan Keamanan Global Terhadp Indonesia. Lembaga ketahanan Nasional RI". (online). (http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/2170_Oerip%20Soebagyo%20II.opd.pdf). Diakses 22 Oktober 2014.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Tap MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.